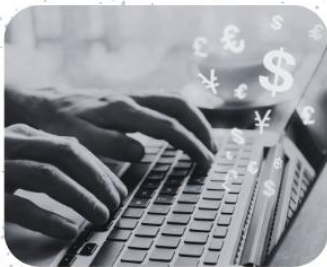




Analisis Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 2024





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Analisis	9
1.4 Batasan Masalah	10
BAB II DATA DAN METODOLOGI	11
2.2. Metodologi Analisis	13
2.2.1 Analisis Ketercapaian Realisasi terhadap Target Pendapatan Daerah.....	14
2.2.2 Analisis Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14
2.2.3 Identifikasi Kontribusi Utama Realisasi Pajak Daerah	15
2.2.4 Analisis Ketercapaian Realisasi terhadap Target Pajak Daerah.....	15



BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	17
3.1. Pendahuluan	18
3.1. Hasil Analisis Ketercapaian Realisasi terhadap Target Pendapatan Daerah	18
3.2. Hasil Analisis Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	19
3.3. Hasil Identifikasi Kontributor Utama Realisasi Pajak Daerah	20
BAB IV SIMPULAN DAN R EKOMENDASI	23



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ketercapaian Realisasi terhadap Target Pendapatan Daerah

2021-2024 19

Tabel 2. Kontribusi Tiap Jenis Pajak Daerah..... 20



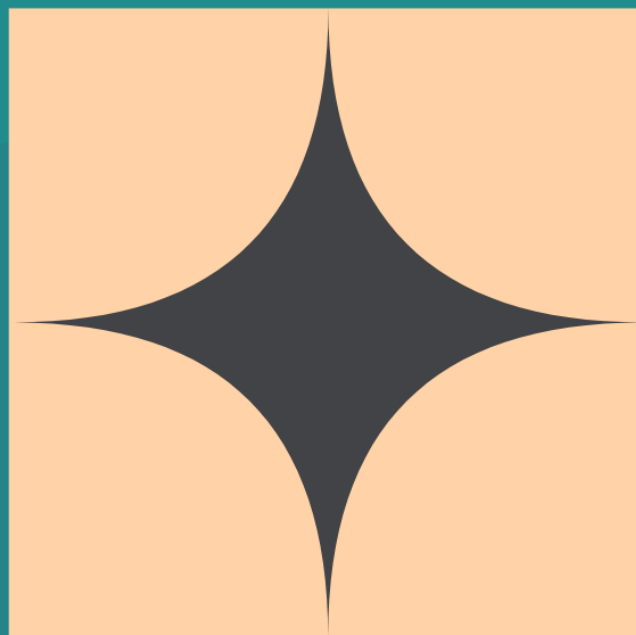
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perbandingan Capaian Pajak Daerah per Jenis Pajak Tahun

2021-2024 22

BAB I

PENDAHULUAN





1.1 Latar Belakang

Pendapatan daerah merupakan salah satu pilar utama pembiayaan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Pasal 1 Ayat (13) menyebutkan bahwa *Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan*. Melalui pendapatan yang memadai, pemerintah daerah dapat menjalankan program dan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap target dan realisasi pendapatan daerah menjadi penting untuk menilai efektivitas perencanaan dan akurasi penetapan target.

Selanjutnya, pada Pasal 1 undang-undang yang sama disebutkan bahwa pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,



dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung hanya memiliki kewenangan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah. Sementara itu, pengelolaan komponen pendapatan lainnya baik yang berasal dari PAD maupun dari sumber Pendapatan Daerah lainnya berada di bawah tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis sesuai kewenangannya masing-masing. Dengan demikian, analisis ini difokuskan pada kinerja Pajak Daerah sebagai bagian dari PAD yang menjadi tanggung jawab langsung Bapenda. Fokus ini penting untuk



memastikan evaluasi target dan realisasi pendapatan dapat diarahkan pada area yang berada di bawah pengelolaan Bapenda sekaligus mengidentifikasi peluang optimalisasi penerimaan dari sektor pajak daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam analisis ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan target dan realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Bandung selama periode tahun 2021-2024?
2. Seberapa besar tingkat capaian realisasi terhadap target pada masing-masing jenis Pajak Daerah?
3. Jenis pajak mana yang menunjukkan kinerja paling optimal serta mana yang masih memerlukan upaya peningkatan penerimaan?

1.3 Tujuan Analisis

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari analisis ini adalah:

1. Menganalisis perkembangan target dan realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bandung periode 2021-2024.

- 
2. Mengukur tingkat capaian realisasi terhadap target pada setiap jenis pajak daerah.
 3. Mengidentifikasi komponen pajak daerah dengan kinerja tinggi maupun rendah sebagai dasar perumusan strategi optimalisasi penerimaan.
 4. Memberikan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Pajak Daerah.

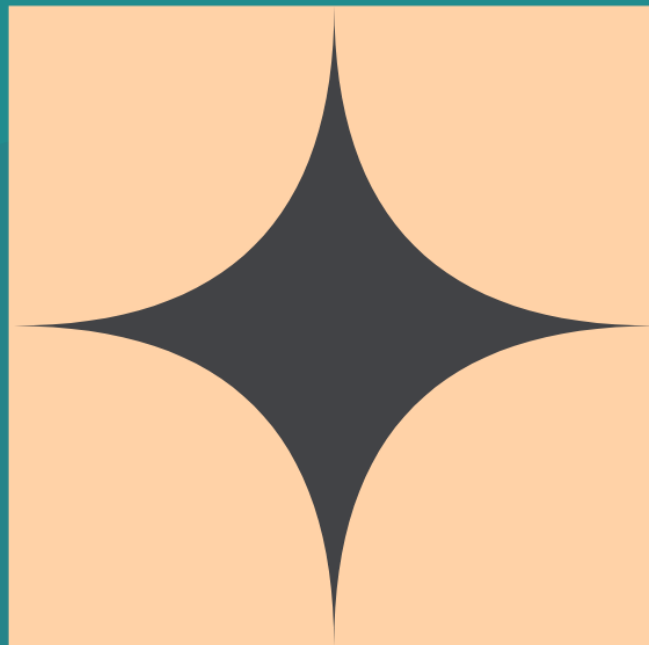
1.4 Batasan Masalah

Agar analisis lebih terfokus dan terarah, kajian ini difokuskan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah sesuai dengan kewenangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung. Analisis ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung dengan periode analisis dibatasi pada tahun 2021 hingga 2024. Fokus ini ditetapkan untuk memastikan bahwa hasil analisis mencerminkan kinerja penerimaan pajak daerah yang menjadi tanggung jawab langsung Bapenda.

BAB II

DATA DAN

METODOLOGI



2.1. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung untuk periode tahun anggaran 2021-2024. Data tersebut mencakup informasi mengenai target dan realisasi pendapatan daerah dengan fokus pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah.

Rincian data yang digunakan meliputi Target dan Realisasi Pendapatan Daerah per Tahun serta Target dan Realisasi per Komponen Pajak Daerah yang terdiri atas Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan, PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Reklame, PBJT atas Tenaga Listrik, PBJT atas Jasa Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Data ini disajikan dalam bentuk angka nominal (Rp) dan persentase capaian terhadap target sehingga dapat



digunakan untuk menganalisis tren pertumbuhan, fluktuasi capaian, dan kontribusi masing-masing jenis pajak daerah.

2.2. Metodologi Analisis

Metodologi yang digunakan dalam analisis ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan fokus pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah. Menurut Sugiyono (2017), metode deskriptif kuantitatif merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data berupa angka dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang bersifat generalisasi. Analisis deskriptif kuantitatif umumnya meliputi penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, grafik, serta perhitungan ukuran pemusatan data seperti *mean*, *median*, *modus*, *standar deviasi*, maupun *persentase*. Analisis dilakukan untuk menilai perkembangan target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2021-2024, mengukur persentase ketercapaian sebagai indikator kinerja, mengidentifikasi jenis pajak dengan kontribusi terbesar maupun terendah, serta menelusuri tren pencapaian tiap jenis pajak daerah.

2.2.1 Analisis Ketercapaian Realisasi terhadap Target Pendapatan

Daerah

Analisis ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana target pendapatan daerah tercapai setiap tahunnya. Untuk menghitung ketercapaian realisasi terhadap target, dilakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ketercapaian PD (\%)} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)}}{\text{Target Pendapatan Daerah (Rp)}} \times 100\%$$

Di mana, hasil perhitungan ini digunakan untuk mengidentifikasi tren capaian pendapatan daerah dari tahun ke tahun.

2.2.2 Analisis Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Analisis ini bertujuan untuk melihat persentase kontribusi masing-masing komponen PAD terhadap total PAD, yaitu Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi Komponen (\%)} = \frac{\text{Realisasi Tiap Komponen PAD (Rp)}}{\text{Total PAD (Rp)}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui persentase kontribusi masing-masing komponen PAD, dapat diidentifikasi komponen penyumbang terbesar sekaligus menentukan area yang berpotensi untuk dioptimalkan.

2.2.3 Identifikasi Kontribusi Utama Realisasi Pajak Daerah

Identifikasi ini bertujuan untuk melihat jenis Pajak mana yang menjadi penyumbang terbesar terhadap total penerimaan pajak dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi Jenis Pajak (\%)} = \frac{\text{Realisasi Tiap Jenis Pajak Daerah (Rp)}}{\text{Total Pajak Daerah (Rp)}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui kontribusi masing-masing jenis pajak, dapat diidentifikasi jenis pajak yang paling berpengaruh.

2.2.4 Analisis Ketercapaian Realisasi terhadap Target Pajak Daerah

Analisis ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana capaian realisasi terhadap target pada masing-masing jenis pajak daerah selama periode 2021-2024. Ketercapaian realisasi terhadap target dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ketercapaian Pajak Daerah (\%)} = \frac{\text{Realisasi Tiap Jenis Pajak (Rp)}}{\text{Total Pajak (Rp)}} \times 100\%$$

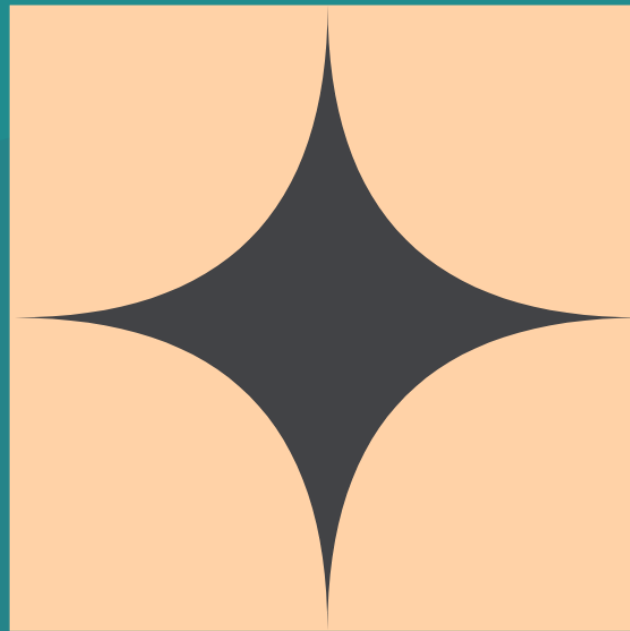


Dengan mengetahui ketercapaian realisasi terhadap target pada masing-masing jenis pajak, dapat diidentifikasi jenis pajak yang paling memiliki capaian tertinggi maupun terendah.

BAB III

HASIL DAN

PEMBAHASAN



3.1. Pendahuluan

Bagian ini menyajikan hasil analisis berdasarkan empat tahap utama yang telah dijelaskan pada bab metodologi. Penyajian hasil dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan visualisasi persentase capaian agar memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi pendapatan daerah Kabupaten Bandung. Melalui penyajian ini, dapat dilihat ketercapaian target terhadap realisasi, kontribusi masing-masing komponen PAD, identifikasi sektor pajak daerah yang dominan, serta evaluasi kinerja tiap jenis pajak daerah. Analisis ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kekuatan dan tantangan dalam optimalisasi penerimaan daerah.

3.1. Hasil Analisis Ketercapaian Realisasi terhadap Target Pendapatan Daerah

Berdasarkan data tahun 2021–2024, target pendapatan daerah Kabupaten Bandung menunjukkan tren peningkatan, dari Rp5,68 triliun (2021) menjadi Rp7,21 triliun (2024) atau naik sekitar Rp1,53 triliun dalam tiga tahun. Namun, persentase ketercapaian realisasi terhadap target justru mengalami tren penurunan. Pada tahun 2021

ketercapaian mencapai 101,3%, kemudian menurun hingga 96,2% di tahun 2024 dengan rincian terlampir pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Ketercapaian Realisasi terhadap Target Pendapatan Daerah 2021-2024

Tahun	Target	Realisasi	Ketercapaian
2021	5,68 Triliun	5,75 Triliun	101,31%
2022	5,91 Triliun	5,88 Triliun	99,48%
2023	6,48 Triliun	6,36 Triliun	98,18%
2024	7,21 Triliun	6,94 Triliun	96,21%

Berdasarkan **Tabel 1**, terlihat bahwa meskipun nominal target pendapatan daerah mengalami peningkatan setiap tahun, tingkat capaian realisasi belum sepenuhnya sejalan dengan penetapan target tersebut.

3.2. Hasil Analisis Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung terdiri atas tiga komponen penyusun, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Apabila dilihat dari sisi PAD, kontribusi terbesar pada tahun 2024 berasal dari Pajak Daerah sebesar 51%, disusul Retribusi Daerah (40%), hasil pengelolaan kekayaan daerah (6%), dan lain-lain PAD yang sah (3%). Hal ini

menegaskan bahwa Pajak Daerah menjadi pilar utama PAD sekaligus menunjukkan sektor yang paling potensial untuk dioptimalkan.

3.3. Hasil Identifikasi Kontributor Utama Realisasi Pajak Daerah

Jenis pajak daerah yang paling dominan pada tahun 2024 adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan kontribusi 35,6%, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik sebesar 26,67%, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 18,39%. Sementara itu, jenis pajak lain seperti Pajak Reklame (1,22%), Pajak Air Tanah (4,6%), serta PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan (0,96%) memberikan kontribusi yang relatif kecil. Rincian lebih lanjut mengenai kontribusi seluruh jenis pajak daerah dapat dilihat pada **Tabel 2**.

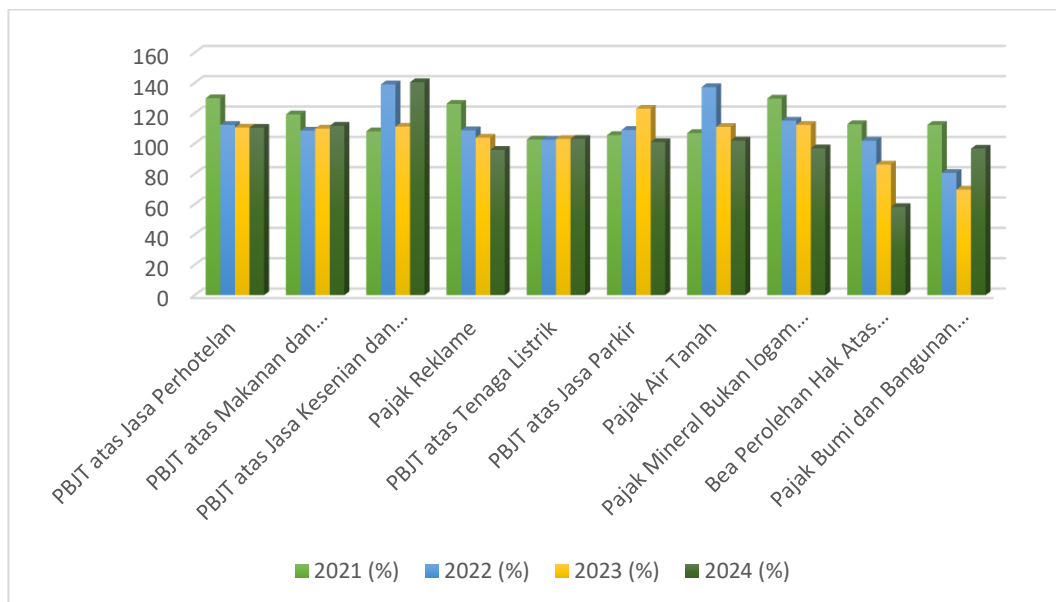
Tabel 2. Kontribusi Tiap Jenis Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah	Kontribusi Realisasi terhadap Total Pajak Daerah
PBJT atas Jasa Perhotelan	3,61%
PBJT atas Makanan dan Minuman	8,59%
PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan	0,96%
Pajak Reklame	1,22%
PBJT atas Tenaga Listrik	26,67%

Jenis Pajak Daerah	Kontribusi Realisasi terhadap Total Pajak Daerah
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	0,11%
PBJT atas Jasa Parkir	0,4%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	35,6%
Pajak Air Tanah	4,6%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	18,39%

3.4. Hasil Analisis Ketercapaian Realisasi terhadap Target Pajak Daerah

Analisis kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi penerimaan untuk masing-masing jenis pajak daerah periode 2021–2024. Berdasarkan **Gambar 1**, capaian Pajak Daerah Kabupaten Bandung pada periode 2021-2024 menunjukkan variasi antarjenis pajak. Beberapa jenis pajak seperti PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan secara konsisten melampaui target dengan capaian sebesar 140% pada tahun 2024.



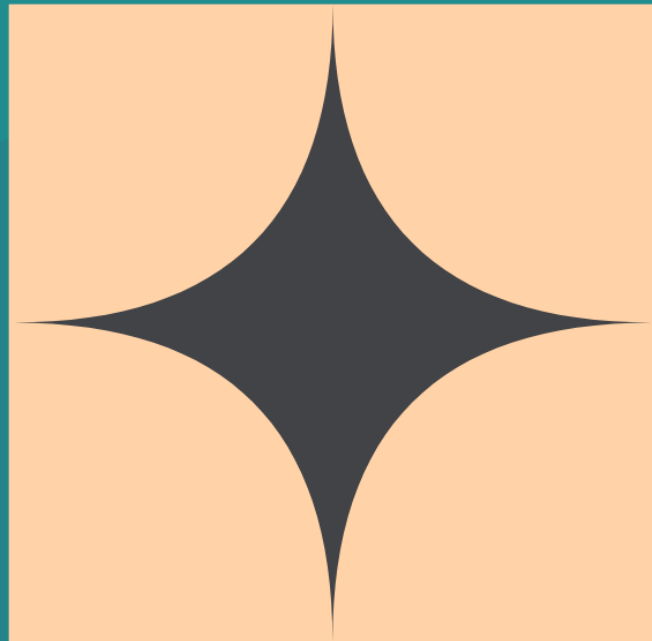
Gambar 1. Perbandingan Capaian Pajak Daerah per Jenis Pajak Tahun 2021-2024

Sementara itu, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang merupakan penyumbang terbesar terhadap total Pajak Daerah mengalami penurunan capaian dari 110,2% pada tahun 2021 menjadi 58% pada tahun 2024. Secara keseluruhan, kinerja pajak daerah memperlihatkan perbedaan tren antarjenis pajak yang mencerminkan variasi kondisi dan potensi pada tiap sektor penerimaan.

BAB IV

SIMPULAN DAN

REKOMENDASI





Secara keseluruhan, pendapatan daerah Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan target dari Rp5,68 triliun pada 2021 menjadi Rp7,21 triliun pada 2024. Namun, ketercapaian realisasi terhadap target justru menurun, dari 101,3% pada 2021 menjadi 96,2% pada 2024. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung berfokus pada pengelolaan Pajak Daerah yang menjadi penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kontribusi mencapai 51% pada tahun 2024, di mana Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), PBJT atas Tenaga Listrik, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi tiga kontributor pajak terbesar. Meski demikian, kinerja antar jenis pajak menunjukkan perbedaan di mana beberapa jenis pajak seperti PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan memiliki capaian tinggi, sedangkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengalami penurunan signifikan dalam empat tahun terakhir. Dengan demikian, penyesuaian target pada jenis pajak dengan tren capaian menurun seperti Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat menjadi langkah bersama untuk menjaga kontribusi Pajak Daerah tetap optimal.